

## **Penghantaran Rancangan APBD 2020**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah DIY tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah pada tanggal 27 Juni 2019 mengusung Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu.

### **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”**

Kondisi ketimpangan antar wilayah, ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan masih merupakan isu tematik yang penting di DIY, sehingga tema RKPD yang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM menjadi upaya utama dalam mewujudkan pertumbuhan berkualitas melalui penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru serta meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 dihantarkan pada tanggal 12 Juli 2019 kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mitra per komisi kemudian Rapat Badan Anggaran di DPRD DIY, selanjutnya menjadi Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah DIY dengan DPRD DIY Nomor:  $\frac{4/KSP/VIII/2019}{55/K/DPRD/2019}$ , serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Nota Kesepakatan Nomor:  $\frac{5/KSP/VIII/2019}{56/K/DPRD/2019}$  tertanggal 22 Agustus 2019. Rancangan APBD 2020 dihantarkan ke DPRD DIY pada tanggal 10 September 2019. Rencana Public Hearing tanggal 14 November 2019.

Berikut adalah Ringkasan Rancangan APBD 2020:

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.464.978.099.723,38</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.106.950.081.220,18</b>
1.1.1.	PAJAK DAERAH	1.872.103.160.000,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	39.906.473.350,01
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	99.880.255.777,75
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	95.060.192.092,42
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.348.394.499.313,20</b>
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	103.244.089.600,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.365.229.514.955,60
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	879.920.894.757,60
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>9.633.519.190,00</b>
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	8.853.500.000,00
1.3.2.	DANA DARURAT	0,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	0,00
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	780.019.190,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.464.978.099.723,38</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.771.362.204.048,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.484.714.879.373,00</b>
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.694.127.503.373,00
2.1.2.	BELANJA BUNGA	0,00
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	0,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	21.310.200.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.000.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA DAN PEMDES	758.277.176.000,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA DAN PEMDES	0,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.286.647.324.675,00</b>
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	165.247.198.387,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.082.576.923.810,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	288.282.500.269,00
2.2.4.	BELANJA BANTUAN KEGIATAN KELEMBAGAAN	750.540.702.209,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.771.362.204.048,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(306.384.104.324,62)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>306.384.104.324,62</b>
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>544.924.104.324,62</b>
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	540.422.144.024,62
3.1.2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0,00
3.1.3.	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0,00
3.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0,00
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0,00
3.1.6.	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0,00
3.1.7.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR	4.501.960.300,00
3.1.8.	PENERIMAAN DARI BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	0,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>544.924.104.324,62</b>

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>238.540.000.000,00</b>
3.2.1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) PEMERINTAH DAERAH	238.540.000.000,00
3.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	0,00
3.2.4.	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0,00
3.2.5.	PENYELESAIAN KEGIATAN D P A - L	0,00
3.2.6.	PEMBAYARAN KEWAJIBAN TAHUN LALU YANG BELUM TERSELESAIKAN	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>238.540.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>306.384.104.324,62</b>
<b>3.3</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>

Mohon mendapatkan masukan-masukan publik dengan mengirimkan ke email: [anggaran.belanja@yahoo.co.id](mailto:anggaran.belanja@yahoo.co.id) dan [bpka@jogjaprovo.go.id](mailto:bpka@jogjaprovo.go.id) untuk menyempurnakan Rancangan APBD 2020.